

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Didasari dari hasil penelitian, berdasarkan analisis variabel *independent* meliputi pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta periode 2010-2022, diperoleh kesimpulan :

1. Pengeluaran per kapita tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien negatif, berarti pengeluaran per kapita belum memberikan pengaruh nyata terhadap persoalan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Terjadi ketidaksesuaian penelitian dengan teori konsumsi Keynes, dikarenakan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta selama tahun 2010 hingga 2022 terus meningkat cukup tinggi. Tak hanya itu, perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata dan pendidikan. Namun, adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Provinsi D.I Yogyakarta memutuskan untuk kembali pada daerah asalnya sehingga meningkatnya pengeluaran per kapita tidak menunjukkan pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.
2. Inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien negatif, berarti kenaikan inflasi belum memberikan pengaruh nyata terhadap ketimpangan pendapatan yang disebabkan inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta bergerak fluktuatif sejak tahun 2010 – 2022. Tingkat inflasi yang menyebabkan harga-harga barang cenderung naik tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat bagi yang memiliki modal dan penghasilan tinggi. Kemudian ketika bahan-bahan pokok mengalami kenaikan, masyarakat yang berpendapatan rendah tidak selalu terkena dampak karena penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta banyak yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut menjadi peringkat ke-2 dengan tenaga kerja terbesar di Provinsi D.I Yogyakarta setelah sektor perdagangan

besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda Motor (BPS Provinsi D.I Yogyakarta, 2022).

3. Upah minimum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien positif, sehingga kenaikan upah minimum dapat berakibat pada kenaikan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini disebabkan adanya perbedaan pendapatan atau upah minimum pada setiap wilayah di Provinsi D.I Yogyakarta berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan tidak meratanya pendapatan yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.
4. Rata-rata lama sekolah memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki koefisien positif, artinya kenaikan RLS dapat berakibat terhadap pada ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta turut meningkat. Kondisi tersebut dikarenakan provinsi ini menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikan baik jenjang menengah maupun perguruan tinggi oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang melimpah akan sekolah menengah dan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Banyak para pelajar yang berasal dari luar daerah menempuh pendidikan di Provinsi D.I Yogyakarta, namun setelah selesai menempuh pendidikan tersebut beberapa orang kembali ke wilayah asal atau berpindah ke kota lain untuk bekerja. Selain itu, tingkat pendidikan yang diukur berdasarkan RLS di Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkatan berbeda di setiap Kabupaten/Kota. Sehingga perbedaan setiap daerah tersebut menyebabkan kualitas sumber daya yang tersedia berbeda-beda dan menimbulkan permasalahan ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran dalam penelitian yaitu:

### **V.2.1 Saran Teoritis**

1. Saran peneliti pada penelitian berikutnya dengan pembahasan yang sama adalah mampu ditambahkan atau diubah pada variabel bebas lainnya untuk dapat menjelaskan apa saja yang mungkin dapat memiliki pengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan.

**Devi Yuliana Putri, 2024**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengambil data penelitian dengan menambahkan kurun waktu dan memperluas objek penelitian yang kemungkinan memiliki permasalahan ketimpangan pendapatan, sehingga tidak hanya terfokus pada beberapa daerah tertentu.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbanyak literatur yang memiliki kaitan dengan variabel penelitian untuk dijadikan bahan acuan pada penyusunan penelitian.

### **V.2.2 Saran Praktis**

#### a) Bagi Pemerintah

1. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan yang tepat di sektor ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tertinggal, seperti mengembangkan sektor pariwisata atau meningkatkan fasilitas umum yang lebih memadai.
2. Pemerintah dapat melakukan pembatasan produksi pada perusahaan yang telah mencapai sasaran tertentu dan secara ketat membatasi impor barang agar tingkat inflasi tetap terjaga stabilitasnya. Hal ini dikarenakan ketika tingkat inflasi tinggi tetapi dibarengi dengan pemerataan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah perlu merancang regulasi yang berfokus pada peningkatan upah dengan bijak agar tidak terlalu tinggi maupun rendah dengan memperhatikan tingkat inflasi dan melihat para pelaku industri. Sehingga dengan langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses konsumsi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan secara bertahap dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
4. Pemerintah diharapkan bisa mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan program pelatihan sesuai dengan permintaan dari lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Sehingga masyarakat dapat mengikuti peluang pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan.

b) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberi wawasan mengenai pengaruh pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum, dan RLS terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 – 2022.